



## Sekuritisasi Pacific Solution: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Penahanan Luar Negeri Australia di Nauru

Febby<sup>1</sup>, Rohma<sup>1</sup>, Nurul Nikita Nasution<sup>1\*</sup>, Hani Libria Gaisyah<sup>1</sup>

1 Faculty of Social and Political Sciences, Sriwijaya University, Palembang, Indonesia

\* Corresponding Author: [nurulnikitanst@gmail.com](mailto:nurulnikitanst@gmail.com)

### ABSTRACT

*Australia has restored offshore detention to Nauru through the Pacific Solution despite continuing criticism globally and violations of human rights. Its continuation raises the question of how this highly debatable policy can still exist. Securitization theory is used in this study to show how asylum seekers are considered threats, resulting in strong state measures to maintain their safety. The study seeks to investigate how the Australian government and media support offshore detention, and to examine the tactics used by humanitarian organizations to challenge this approach. A qualitative case study approach is used in the study, which involves critical discourse analysis to look at political statements, media reports, and advocacy materials from 2024. An examination of the situation shows that both political figures and media used alarming and negative language to describe asylum seekers. These narratives changed public opinion and helped people think offshore detention was necessary for security. Critically, discussions advocating legal and moral points of view remained largely confined to a small audience. The conclusion is that this policy works only by being discussed as a security threat rather than its effects on the crisis.*

*Keywords: Pacific Solution, Offshore Detention, Securitization and Media Narrative*

### ABSTRAK

Australia telah mengembalikan penahanan lepas pantai ke Nauru melalui Pacific Solution meskipun terus mendapat kritik global dan pelanggaran hak asasi manusia. Kelanjutannya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kebijakan yang sangat diperdebatkan ini masih bisa ada. Teori sekuritisasi digunakan dalam studi ini untuk menunjukkan bagaimana pencari suaka dianggap sebagai ancaman, yang mengakibatkan tindakan tegas negara untuk menjaga keselamatan mereka. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pemerintah dan media Australia mendukung penahanan di luar negeri, serta untuk meneliti taktik yang digunakan oleh organisasi kemanusiaan untuk menantang pendekatan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, yang melibatkan analisis wacana kritis untuk melihat pernyataan politik, laporan media, dan materi advokasi dari tahun 2024. Sebuah pemeriksaan situasi menunjukkan bahwa baik tokoh politik maupun media menggunakan bahasa yang mengkhawatirkan dan negatif untuk menggambarkan pencari suaka. Narasi-narasi ini mengubah opini publik dan membantu orang berpikir bahwa penahanan di luar negeri diperlukan untuk keamanan. Secara kritis, diskusi yang mendukung sudut pandang hukum dan moral tetap sebagian besar terbatas pada audiens kecil. Kesimpulannya adalah bahwa kebijakan ini hanya berfungsi jika dibahas sebagai ancaman keamanan daripada dampaknya terhadap krisis.

**Kata Kunci:** *Pacific Solution, Penahanan Luar Negeri, Sekuritisasi dan Narasi Media*

*This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jh.ak.v2i1.10519>

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan penahanan lepas pantai Australia, yang dikenal sebagai *Pacific Solution*, merupakan salah satu strategi yang paling diperdebatkan dalam tata kelola pengungsi global. Awalnya diperkenalkan pada tahun 2001 di bawah pemerintahan Perdana Menteri John Howard, kebijakan ini bertujuan untuk mencegah para pencari suaka yang tiba dengan perahu dengan memproses mereka di negara ketiga, khususnya di Nauru dan Pulau Manus di Papua Nugini (Alunza, 2018). Meskipun pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan respons yang diperlukan untuk mengatasi migrasi maritim yang tidak teratur dan penyelundupan manusia, kebijakan ini dengan cepat memicu kritik domestik dan internasional atas implikasi kemanusiaan dan hukumnya.

Pada intinya, *Pacific Solution* berfungsi sebagai mekanisme pencegahan. Dengan menolak para pencari suaka masuk ke daratan Australia, kebijakan ini berusaha menghilangkan insentif untuk melakukan perjalanan laut yang berbahaya. Para pembuat kebijakan mengklaim bahwa pendekatan ini menyelamatkan nyawa dan melindungi perbatasan Australia (Walbrooke, 2014). Namun, pembenaran keamanan ini menutupi logika politik yang lebih dalam: pembungkaman kembali pencari suaka bukan sebagai individu yang rentan yang melarikan diri dari penganiayaan, melainkan sebagai elemen ilegal, berbahaya, dan bahkan kriminal yang menjadi ancaman bagi negara Australia (Every, 2007).

Secara internasional, kebijakan penahanan lepas pantai Australia bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan global yang berakar pada Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Instrumen-instrumen ini mewajibkan negara-negara yang meratifikasi protokol tersebut, termasuk Australia, untuk melindungi individu-individu yang melarikan diri dari penganiayaan, tanpa menghukum modus kedatangan mereka. Prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara-negara di mana mereka mungkin menghadapi bahaya, merupakan landasan perlindungan pengungsi. Namun, dengan mengeksternalisasi proses penanganan suaka ke negara ketiga seperti Nauru, Australia tidak hanya melepaskan tanggung jawab yurisdiksionalnya, tetapi juga mengingkari semangat solidaritas global yang menjadi landasan sistem perlindungan pasca-Perang Dunia II. Pendekatan ini telah memicu kritik luas dari badan-badan seperti UNHCR dan berbagai organisasi hak asasi manusia, yang menyoroti dampak negatif dari alih tanggung jawab perlindungan ke negara-negara dengan kapasitas kelembagaan yang lebih terbatas, serta implikasinya terhadap keberlanjutan rezim suaka internasional (Moretti, 2021).

Kebijakan ini tidak berdiri dalam ruang hampa, tetapi dipertahankan dalam konteks sosial dan politik domestik yang semakin ditandai oleh penurunan sensitivitas publik terhadap isu kemanusiaan. Dalam beberapa dekade terakhir, persepsi publik juga telah berevolusi-bukan dalam hal empati, tetapi dalam hal kelelahan. Pengulangan retorika perlindungan perbatasan serta liputan media yang fragmentaris dan sporadis telah menghasilkan kondisi yang oleh sejumlah akademisi disebut sebagai desensitisasi kemanusiaan. Praktik penahanan di luar negeri yang sebelumnya dianggap sebagai tindakan luar biasa kini telah dinormalisasi dalam imajinasi politik publik sebagai elemen rutin dari pengelolaan migrasi. Erosi urgensi moral ini telah memungkinkan pemerintah untuk mempertahankan kebijakan yang problematik tanpa menghadapi oposisi publik yang signifikan. Akibatnya, terbentuklah jurang antara pengetahuan publik dan respons publik—suatu

kesenjangan yang diperkuat oleh penyederhanaan diskursif di media dan retorika pemerintah yang menekankan ancaman atas keamanan nasional (Every, 2007).

Narasi sekuritisasi ini tidak bersifat temporal atau partisan, melainkan telah menjadi elemen konsisten dalam berbagai pemerintahan, terlepas dari afiliasi politiknya. Meskipun sempat dihentikan pada tahun 2008, kebijakan penahanan lepas pantai dihidupkan kembali pada tahun 2012 dan terus mendapatkan legitimasi politik dalam konteks ketidakpastian geopolitik dan tekanan domestik. Pada tahun 2024, *Pacific Solution* diimplementasikan kembali secara penuh, mempertegas kontinuitas logika sekuritisasi dalam pengelolaan migrasi tidak teratur di Australia. Pengaktifan ulang pemrosesan suaka di Nauru terjadi dalam lanskap politik yang didominasi oleh kekhawatiran terhadap kedaulatan, keamanan perbatasan, dan kontrol migrasi—semuanya diperkuat oleh narasi media dan retorika politik yang menempatkan pencari suaka sebagai objek ancaman, bukan sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan (Alunza, 2018).

Peresmian *Pacific Solution* tidak dapat dipisahkan dari kegunaan politiknya dalam konteks domestik Australia. Sejak Peristiwa Tampa 2001, para pencari suaka yang tiba dengan perahu telah digambarkan sebagai ancaman politik yang menguntungkan, terutama selama pemilihan umum federal. Pemerintah berturut-turut telah memanfaatkan wacana keamanan perbatasan untuk mendapatkan keuntungan elektoral, sering kali menggunakan konsensus bipartisan mengenai kebijakan imigrasi yang keras bukan sebagai hal yang prinsip, tetapi sebagai respons terhadap kecemasan pemilih. Oleh karena itu, sekuritisasi suaka telah berfungsi sebagai alat politik untuk mengkonsolidasikan otoritas dan menarik sentimen nasionalis. Siklus penguatan politik ini telah menyulitkan upaya untuk menentang kebijakan tersebut dengan alasan moral atau hukum, karena setiap kelonggaran yang diberikan kepada para pencari suaka berisiko dicap sebagai kelemahan dalam hal keamanan nasional (Every, 2007).

Pemberlakuan kembali kebijakan ini juga menyoroti ketergantungan ekonomi dan diplomatik Nauru terhadap Australia. Sebagai negara kepulauan kecil dengan sumber daya alam dan pilihan ekonomi yang terbatas, Nauru telah menerima peran sebagai tuan rumah dengan imbalan bantuan keuangan dan investasi infrastruktur (Maclellan, 2013). Pengaturan ini telah dikritik sebagai bentuk diplomasi transaksional yang mengorbankan kedaulatan Nauru dan kewajiban Australia di bawah hukum pengungsi internasional (Abbondanza, 2024).

Salah satu konsekuensi yang paling signifikan dari sekuritisasi kebijakan suaka adalah erosi akuntabilitas demokratis. Dengan membingkai pencari suaka sebagai ancaman yang mendesak, para pemimpin politik dapat mengalihkan perdebatan dari pembuatan kebijakan yang transparan dan berbasis hak asasi manusia ke arah apa yang disebut oleh para ahli sebagai politik darurat. Dalam kerangka kerja seperti itu, pengawasan legislatif yang normal sering kali dilewati, dan keputusan dibuat melalui kekuasaan eksekutif dengan konsultasi publik yang minimal. *Pacific Solution* mencontohkan dinamika ini: alih-alih mendorong musyawarah terbuka tentang bagaimana mengelola migrasi secara manusiawi, pemerintah justru menggunakan alasan keamanan nasional untuk menjustifikasi perubahan kebijakan yang cepat dan seringkali tidak jelas. Kekhawatiran publik akan keamanan digunakan untuk menekan perbedaan pendapat dan meminggirkan sudut

pandangan alternatif yang mengadvokasi kasih sayang dan perlindungan hukum. Seiring berjalannya waktu, gaya pemerintahan seperti ini tidak hanya berdampak pada para pencari suaka, namun juga menurunkan kualitas partisipasi demokratis secara lebih luas. Ketika keputusan kebijakan menjadi semakin terisolasi dari wacana hak asasi manusia dan keterlibatan masyarakat sipil, ruang untuk perdebatan yang berarti tentang kontrak keadilan migrasi. Dengan demikian, bertahannya penahanan di luar negeri menandakan lebih dari sekadar kegagalan perlindungan pengungsi-ini mewakili pergeseran yang lebih luas dalam cara negara-negara demokrasi liberal mengelola tantangan global yang kompleks dengan kedok keamanan (Prasad, 2021).

Dukungan publik terhadap penahanan di luar negeri dipertahankan tidak hanya melalui hasil kebijakan, tetapi juga melalui komunikasi strategis. Para pemimpin politik sering menggunakan bahasa berbasis keamanan-istilah-istilah seperti “perlindungan perbatasan”, “pendatang ilegal”, dan “ancaman nasional”—untuk membentuk opini publik dan membenarkan respons kebijakan yang luar biasa (Susanto, 2024). Media sering kali mencerminkan pemingkakan ini, sehingga memperkuat persepsi publik bahwa pencari suaka secara inheren berisiko dan penahanan di lepas pantai dibenarkan dan diperlukan (Mckay, 2012). Sementara itu, organisasi-organisasi kemanusiaan dan kelompok-kelompok advokasi berusaha menentang narasi dominan ini dengan menampilkan para pencari suaka sebagai korban konflik, penganiayaan, dan kegagalan negara, dan bukan sebagai ancaman keamanan (Human Rights Watch, 2016).

Kegigihan Australia dalam mempertahankan penahanan di luar negeri telah memicu kritik dari berbagai lembaga global. UNHCR, misalnya, secara konsisten mengecam kebijakan ini sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, dengan menyoroti dampak psikologis yang parah, ketidakpastian status hukum, serta risiko jangka panjang terhadap kondisi tanpa kewarganegaraan yang dialami para pencari suaka (Human Rights Watch, 2016). Kritik dari badan-badan internasional ini telah memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen Australia terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang selama ini diklaim sebagai bagian dari identitasnya di arena global. Dalam konteks hubungan bilateral maupun forum regional, kebijakan pengungsi Australia tidak hanya menjadi sumber ketegangan diplomatik, tetapi juga mencerminkan tantangan etis dan politik dalam cara negara-negara maju merespons dinamika migrasi global sembari menghindari tanggung jawab yang seharusnya mereka emban. Dengan demikian, studi ini memposisikan praktik penahanan luar negeri bukan semata sebagai isu kebijakan domestik, melainkan sebagai fenomena transnasional yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam rezim migrasi internasional.

Daya tahan kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari narasi yang bersifat sekuritisasi dan hegemonik, yang secara efektif menetralkan kritik-kritik tersebut di ranah publik. Meskipun dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia—termasuk kondisi penahanan yang merendahkan martabat, krisis kesehatan mental yang meluas, dan praktik penelantaran institusional—semakin meningkat (Farrel, 2016), kebijakan ini tetap memperoleh legitimasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lanskap pengambilan keputusan publik, persepsi yang dibentuk oleh wacana keamanan sering kali memiliki bobot yang lebih besar daripada imperatif moral atau kemanusiaan. Sekuritisasi tidak hanya mereproduksi ketakutan, tetapi juga menciptakan kondisi diskursif yang memungkinkan negara untuk mengabaikan tanggung jawab normatifnya tanpa kehilangan dukungan domestik. Dengan kata lain, keberlangsungan kebijakan ini lebih mencerminkan

keberhasilan kontrol naratif daripada efektivitas kebijakan itu sendiri dalam menangani persoalan migrasi.

Sementara media arus utama di Australia sering kali memperkuat pembingkaiannya sekuritisasi pemerintah, media independen, pelapor, dan jurnalis internasional telah menyajikan perspektif yang sangat berbeda. Laporan seperti *The Nauru Files*, sebuah kumpulan laporan insiden yang bocor yang diterbitkan oleh *The Guardian* mengungkapkan pelecehan, penelantaran, dan trauma yang meluas di dalam pusat-pusat penahanan di luar negeri, terutama di kalangan anak-anak (Farrell, 2016). Kisah-kisah ini jarang mendapat perhatian yang sama di media nasional, dan sering kali hanya dimuat di halaman opini atau siaran pinggiran. Namun, ketika diperkuat oleh media internasional dan kelompok-kelompok kemanusiaan, mereka menawarkan narasi tandingan yang memanusiakan kembali para pencari suaka dan mengekspos pengorbanan kemanusiaan dari kebijakan Australia. Kesenjangan dalam peliputan menunjukkan kekuatan struktural narasi media dalam membentuk sikap publik: sementara berita yang sejalan dengan pemerintah mendominasi arus utama, perspektif yang lebih kritis dan berempati berjuang untuk mendapatkan visibilitas yang berkelanjutan (Mckay, 2012).

*Reimplementasi Pacific Solution* pada tahun 2024 memerlukan kajian akademik yang tajam dan reflektif. Fenomena ini menawarkan ruang penting untuk menguji kembali relevansi teori sekuritisasi serta untuk menganalisis secara kritis bagaimana bahasa politik, narasi media, dan konfigurasi diplomatik bekerja secara sinergis dalam mempertahankan kebijakan yang tidak hanya kontroversial, tetapi juga bertahan lintas rezim pemerintahan. Dalam kerangka ini, *Pacific Solution* tidak diperlakukan semata sebagai himpunan kebijakan teknokratis, melainkan sebagai konstruksi diskursif—sebuah hasil dari praktik retorik, strategi persuasi publik, dan proses normalisasi bentuk-bentuk tata kelola yang bersifat luar biasa.

Sehingga dalam penelitian ini, kami akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan penahanan luar negeri Australia disekuritisasi melalui perangkat wacana politik dan media dalam konteks tahun 2024. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana pemerintah Australia mengonstruksi pencari suaka sebagai ancaman eksistensial, bagaimana konstruksi ini memperoleh legitimasi melalui media arus utama, serta bagaimana aktor-aktor kemanusiaan berupaya membingkai ulang isu ini sebagai persoalan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini secara kritis memeriksa peran Nauru dalam arsitektur kebijakan ini—tidak hanya sebagai lokasi fisik penahanan, tetapi sebagai aktor penting dalam jejaring kompleks diplomasi internasional, kepentingan ekonomi, dan kompromi normatif.

Dengan menggunakan kerangka teori sekuritisasi, studi ini berupaya mengungkap bagaimana wacana digunakan secara strategis untuk membenarkan tindakan-tindakan luar biasa negara, membentuk persepsi publik, serta mengecilkan ruang bagi narasi-narasi alternatif yang berlandaskan pada prinsip kemanusiaan. Melalui pendekatan analisis wacana kritis terhadap pernyataan politik, dokumen kebijakan, serta representasi media, penelitian ini bertujuan mengurai mekanisme retorik dan institusional yang memungkinkan *Pacific Solution* untuk terus bertahan, meskipun berhadapan dengan konsekuensi serius terhadap hak asasi manusia.

## 2. KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh studi keamanan sebagai pendekatan kritis untuk mempelajari ketika agen-agen politik mengubah masalah-masalah tertentu menjadi masalah pertahanan yang sangat penting. Barry Buzan bersama dengan Ole Wæver merupakan kontributor utama teori keamanan yang dikembangkan di *Copenhagen School*. Keamanan melampaui ancaman militer karena bahasa dapat mengangkat isu-isu ke tingkat yang membutuhkan tanggapan yang mendesak dan luar biasa meskipun ancaman eksistensial yang ada tidak terlalu signifikan (Taureck, 2006).

Menurut Wæver dan Buzan, *secure-ization* muncul ketika para aktor politik mengubah hal-hal tertentu menjadi ancaman krusial yang membutuhkan perlindungan terhadap entitas-entitas penting seperti kedaulatan nasional atau keamanan publik atau tatanan sosial. Proses retorika tertentu yang disebut oleh Wæver sebagai “tindak tutur” sangat penting untuk menciptakan ancaman melalui ruang konstruksi retorika. Khalayak termasuk pemilih dan institusi media serta institusi pemerintah melanjutkan dengan “mengamankan” sebuah isu setelah mereka menerima pemingkai keamanan yang diusulkan yang mengizinkan tindakan luar biasa meskipun melanggar kerangka hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Taureck, 2006).

Kerangka analisis yang didasarkan pada teori ini secara efektif menjelaskan pola-pola pemingkai yang umum digunakan untuk menggambarkan para pencari suaka di Australia. Pencari suaka yang tiba dengan perahu ditampilkan melalui pernyataan politik dan kampanye publik terutama sebagai pelanggar masuk secara ilegal dan unsur kriminal serta risiko terorisme. Penggambaran tersebut berfungsi sebagai strategi keamanan untuk mengubah migrasi tidak teratur menjadi ancaman terhadap negara-bangsa Australia dan bukan sebagai masalah kemanusiaan. Cara khusus untuk menggambarkan pencari suaka melalui bahasa tertentu memungkinkan pemerintah untuk membenarkan penahanan di luar negeri dengan menumbangkan metode pemrosesan suaka tradisional dengan penegakan perbatasan yang keras.

Wæver menetapkan bahwa sekuritisasi bergantung pada penerimaan khalayak atas deklarasi negara dan bukan semata-mata ditentukan oleh deklarasi negara. Teori ini bekerja paling baik dalam penelitian politik karena menunjukkan strategi negara dalam membicarakan isu-isu di samping kemampuan mereka untuk membentuk pemahaman publik dan mendukung keputusan kebijakan. Sekuritisasi pencari suaka telah terbukti efektif di Australia karena sebagian besar warga negara Australia bersama dengan media mendukung kebijakan imigrasi yang ketat sepanjang sejarah (Taureck, 2006).

Dalam implementasi ulang *Pacific Solution* pada tahun 2024, teori sekuritisasi berguna untuk menganalisis bagaimana aktor politik sekali lagi meringkai pencari suaka sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan menandakan pencari suaka sebagai kedatangan ilegal dan mengangkat risiko seperti kejahatan atau kekacauan, para pemimpin politik membangun rasa urgensi yang membenarkan tindakan luar biasa (Susanto, 2024). Pernyataan-pernyataan ini bertindak sebagai tindakan tutur yang membentuk persepsi publik dan melegitimasi penahanan di luar negeri. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis untuk meneliti bagaimana bahasa semacam itu terus menormalkan kebijakan luar biasa dalam lanskap politik saat ini.

Perlu dicatat, Buzan dan Wæver tidak menyatakan bahwa sekuritisasi merupakan baik ataupun buruk. Sekuritisasi ini hanya sekedar alat politik dan merupakan cara untuk menaikkan sebuah isu ke tingkat politik dengan menyatakannya sebagai masalah keamanan. Netralitas inilah yang membuat teori ini berguna untuk analisis kritis. Teori ini membuka ruang untuk mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari sekuritisasi, apa yang tidak dibicarakan, dan bagaimana narasi alternatif-seperti dari organisasi-organisasi kemanusiaan-dapat menantang pemingkalan dominan (Taureck, 2006).

Dengan demikian, teori sekuritisasi memberikan kerangka analitis yang kuat untuk menelusuri bagaimana kebijakan pengungsi di Australia dibentuk melalui bahasa, kekuasaan, dan konstruksi persepsi. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap struktur diskursif dan politik yang melandasi keputusan kontroversial, seperti penggunaan Nauru sebagai lokasi penahanan luar negeri.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kerangka politik dan diskursif pencari suaka dalam konteks penerapan kembali Pacific Solution oleh Australia pada tahun 2024. Ini menggunakan desain studi kasus, dengan fokus pada kebijakan penahanan lepas pantai di Nauru sebagai contoh spesifik dari praktik sekuritisasi. Subjek penelitian ini mencakup pernyataan resmi pemerintah, laporan media, dan publikasi advokasi terkait penahanan luar negeri selama periode kebijakan 2024. Materi-materi ini dipilih untuk meneliti bagaimana aktor politik, institusi media, dan organisasi kemanusiaan membangun narasi yang bersaing tentang pencari suaka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian perpustakaan. Data yang relevan dikumpulkan dari sumber sekunder seperti artikel jurnal akademik, dokumen kebijakan pemerintah, liputan berita dari media arus utama dan independen, serta pernyataan publik dari LSM dan organisasi internasional. Pendekatan ini memastikan akses ke berbagai perspektif dan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung analisis berbasis wacana.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis wacana kritis. Metode ini diterapkan untuk mengidentifikasi pola linguistik, strategi retorik, dan teknik *framing* yang digunakan untuk membangun pencari suaka baik sebagai ancaman keamanan maupun sebagai subjek kemanusiaan. Dengan memeriksa kata kunci, metafora, dan struktur naratif, studi ini mengungkap bagaimana sekuritisasi diproduksi dan dipertahankan dalam wacana politik dan media, serta bagaimana kerangka alternatif mencoba menantang narasi dominan.

### 4. RESULT AND DISCUSSION

#### 4.1. Implementasi Penahanan Luar Negeri

Pada tahun 2024, pemerintah Australia mengembalikan kebijakan penahanan lepas pantai yang kontroversial, yang merupakan pilar utama *Pacific Solution* yang diluncurkan pada awal tahun 2000-an. Keputusan ini dipicu oleh meningkatnya kedatangan pencari suaka melalui jalur laut, dan segera ditempatkan sebagai komponen sentral dalam strategi negara untuk mengelola migrasi tidak

teratur (Walbrooke, 2014). Namun, implementasi ulang kebijakan tersebut tidak diposisikan sebagai salah satu dari berbagai opsi kebijakan yang tersedia, melainkan dipresentasikan sebagai tindakan yang tak terelakkan demi melindungi integritas teritorial dan keamanan nasional Australia. Ditinjau dari perspektif teori sekuritisasi, kebijakan ini tidak muncul secara terisolasi dari konteks politik dan sosial. Sebaliknya, ia berakar pada serangkaian wacana yang secara konsisten membingkai pencari suaka sebagai ancaman eksistensial. Melalui tindak tutur resmi, pernyataan pemerintah, dan pelibatan media arus utama, kedatangan pencari suaka direpresentasikan bukan sebagai fenomena kemanusiaan, melainkan sebagai bentuk krisis yang memerlukan respons luar biasa (Taureck, 2016).

Pemerintah Australia telah lama menggambarkan kedatangan pencari suaka sebagai ancaman keamanan nasional. Penggambaran naratif ini berfungsi sebagai mekanisme inti dari sekuritisasi, mengubah pencari suaka dari orang yang terlantar menjadi ancaman yang dibangun terhadap negara (Walbrooke, 2014). Ini adalah alasan utama dari kebijakan penahanan lepas pantai. Dikatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah mereka yang mungkin menjadi ancaman bagi keamanan nasional agar tidak datang ke Australia (Abbondanza, 2024).

Pemerintah Australia mengaitkan pencari suaka dengan perlindungan perbatasan negara dan masalah masuk secara ilegal. Wacana pemerintah membentuk praktik yang merendahkan status manusia perahu dari migran yang tidak berdaya menjadi ancaman potensial bagi keamanan Australia. Klaim ini diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang mengaitkan para pencari suaka dengan jaringan teroris, kejahatan terorganisir, dan penyelundup manusia, namun tidak ada bukti pendukung yang tersedia untuk mengukuhkan klaim ini. Selama periode tersebut, para politisi terus-menerus menggunakan istilah pendatang maritim ilegal dan krisis keamanan perbatasan untuk menggambarkan para pencari suaka sebagai ancaman terhadap keamanan nasional (Susanto, 2024). Pemerintah percaya bahwa hanya tindakan penahanan lepas pantai yang keras yang dapat melindungi Australia dari ancaman keamanan, termasuk invasi kriminal dan intimidasi dalam negeri. Dalam teori sekuritisasi, tindakan penempatan diri ini tidak hanya bergantung pada pernyataan politik, tetapi juga pada penerimaan pernyataan tersebut oleh publik, yang harus menginternalisasi ancaman agar kebijakan luar biasa dapat dilegitimasi (Taureck, 2016).

Solusi baru harus dikembangkan karena pencari suaka telah berubah menjadi masalah nasional yang mendesak. Pemerintah Australia menggunakan pernyataan resmi bahwa penahanan di lepas pantai adalah satu-satunya strategi yang tersedia untuk mencegah para pencari suaka mencapai pantai Australia dan mencegah bahaya yang telah diantisipasi (Susanto, 2024). Para pencari suaka menerima penetapan mereka sebagai ancaman nasional, sementara pemerintah Australia memposisikan diri sebagai pelindung tanah air untuk menetapkan persyaratan kebijakan yang keras untuk mempertahankan negara. Alasan keamanan nasional menjadi dasar fundamental untuk mengadopsi penahanan di luar negeri sebagai sebuah kebijakan. Selama bertahun-tahun pemerintah merelokasi pembenaran awal untuk integritas imigrasi menjadi landasan utama kebijakan tersebut. Meningkatnya tekanan internasional yang dikombinasikan dengan tuntutan hukum serta meningkatnya kritik dari masyarakat umum mengharuskan pemerintah untuk mengubah pesan publik mereka tentang perlakuan terhadap para pencari suaka. Australia kini mengklasifikasikan penahanan lepas pantai sebagai sistem fundamental untuk mengendalikan imigrasi, bukan sebagai tindakan keamanan semata (Prasad, 2021).

Perubahan ini diikuti dengan pendekatan baru dalam menjelaskan tujuan kebijakan tersebut: alih-alih hanya menggambarkannya sebagai tindakan keamanan, pemerintah kini menyebut

penahanan lepas pantai sebagai cara untuk melindungi hukum imigrasi Australia dan memastikan proses suaka yang kredibel. Pemerintah menegaskan bahwa para pencari suaka ini memasuki Australia secara ilegal. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa mereka serius dalam memastikan sistem imigrasi Australia tertutup untuk masuk secara ilegal dan orang-orang yang melompati antrian. Ini adalah argumen yang ditujukan untuk mengatasi masalah keamanan, selain untuk mengatasi masalah keadilan dan ketertiban dalam proses imigrasi (Susanto, 2024).

Ketika pemerintah memberikan komentar, para pejabat secara teratur membahas bagaimana kebijakan ini membantu menjaga proses suaka. Mereka mengindikasikan bahwa menahan individu dalam penahanan di luar negeri merupakan metode yang signifikan dalam menegakkan hak Australia untuk menentukan siapa yang masuk ke negara ini (Walbrooke, 2014). Pemerintah ingin menunjukkan bahwa menjaga keamanan hukum imigrasi Australia adalah prioritas utama. Pemerintah membawa penahanan di luar negeri tidak hanya sebagai cara untuk menangani ancaman keamanan, tetapi juga sebagai langkah yang diperlukan untuk menghentikan sistem imigrasi Australia agar tidak dibanjiri oleh orang-orang yang tidak sah yang masuk ke benua ini.

Pendekatan hukum dan prosedural terhadap penahanan di luar negeri ini penting karena memungkinkan pemerintah untuk berargumen bahwa kebijakan ini sesuai dengan kewajiban hukum internasional Australia, termasuk Konvensi Pengungsi tahun 1951. Pemerintah juga terus mempertahankan bahwa keamanan perbatasan itu penting. Dalam teori sekuritisasi, klaim semacam itu berfungsi sebagai tindakan ujaran yang mengangkat migrasi tidak teratur menjadi ancaman langsung, membenarkan penggunaan kebijakan luar biasa seperti penahanan di luar negeri (Taureck, 2016). Pemerintah juga mulai menyoroiti bagaimana penahanan di luar negeri membantu memastikan bahwa orang-orang yang mencari suaka benar-benar mencari suaka dan tidak melewati prosedur yang benar (Tanzila, 2015). Penjelasan dua arah ini berhasil bagi pemerintah karena menjelaskan kebijakan ini sebagai mekanisme keamanan dan kebijakan imigrasi yang sebenarnya.

Keamanan nasional dan manajemen imigrasi menjadi pusat dari kebijakan ini menurut para pejabat pemerintah. Perwakilan pemerintah terutama mempromosikan penahanan di lepas pantai sebagai metode yang dapat mengurangi jumlah pencari suaka yang menggunakan transportasi perahu untuk mengakses Australia. Para pemimpin pemerintah mengklaim bahwa penahanan di lepas pantai berhasil menghentikan kedatangan perahu sehingga menghindari kematian di laut dan juga kapal penyelundup yang penuh sesak. Otoritas pemerintah secara teratur menunjukkan betapa suksesnya kebijakan ini dalam membuat para pencari suaka menghindari perjalanan laut yang berbahaya. Menurut pihak berwenang, hal itu perlu dilakukan untuk mencegah orang-orang melakukan perjalanan perahu yang berbahaya ke Australia (Salyer, 2020). Perubahan fokus ini dari kondisi kemanusiaan ke upaya pencegahan mencerminkan efek depolitikalisasi dari sekuritisasi, di mana debat moral digantikan oleh bahasa teknis dan keberhasilan statistik (Taureck, 2020).

Dalam pernyataan publik dan pengarahannya media, perwakilan pemerintah Australia terus-menerus menyatakan bahwa berkurangnya kedatangan perahu membuktikan bahwa kebijakan tersebut berhasil. Ancaman penahanan di lepas pantai telah memungkinkan pemerintah Australia untuk mencegah para pencari suaka melakukan perjalanan laut yang berbahaya menuju wilayah Australia (Tanzila, 2015). Dengan menerapkan kebijakan ini, para pencari suaka dapat diproses dalam kondisi yang aman dan tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka di lautan.

Para politisi pada umumnya menyetujui langkah ini, namun mereka mengabaikan kekhawatiran publik yang semakin meningkat mengenai fasilitas penahanan di lepas pantai dan juga korban jiwa yang terlibat dalam penahanan para pencari suaka di lokasi-lokasi yang jauh dan terpencil. Pemerintah berfokus pada sejauh mana kedatangan perahu telah dihentikan oleh kebijakan tersebut. Hal ini membuat orang-orang tidak terlalu fokus pada kondisi penahanan dan lebih fokus pada hasil dari kebijakan tersebut. Pesannya sangat jelas: penahanan di lepas pantai berhasil. Kebijakan pemerintah terhadap pencari suaka berhasil mencapai tujuannya untuk melindungi perbatasan Australia dan mengurangi risiko migrasi tidak teratur (Every, 2007).

#### 4.2. Nauru Sebagai Tempat Pemrosesan Pencari Suaka

Peran Nauru dalam pengaktifan kembali kebijakan penahanan luar negeri Australia pada tahun 2024 menempatkan negara kepulauan kecil ini di garis depan pelaksanaan *Pacific Solution*. Sebagai salah satu negara terkecil di dunia, baik dari segi populasi maupun wilayah geografis, keterlibatan Nauru dalam *Pacific Solution* umumnya dilihat melalui lensa kebutuhan ekonomi dan penyelarasan diplomatik. Ketika Australia berusaha menghidupkan kembali ambisi pemrosesan lepas pantainya pada tahun 2024, Nauru memainkan peran penting dalam operasi kebijakan tersebut (Susanto, 2024). Nauru menyediakan lokasi yang terisolasi di mana para pencari suaka dapat ditampung sementara klaim pengungsi mereka diproses.

Bagi Nauru, keputusannya untuk ikut serta dalam *Pacific Solution* sebagian besar dimotivasi oleh motif ekonomi. Nauru selalu memiliki masalah keuangan yang sangat besar karena tidak memiliki sumber daya alam dan juga terbatasnya pilihan untuk meningkatkan ekonominya secara berkelanjutan. Setelah industri pertambangan fosfat yang sebelumnya berkembang pesat runtuh, negara ini pada dasarnya tidak memiliki struktur ekonomi. Perjanjian dengan Australia untuk menjadi tuan rumah pusat penahanan lepas pantai memberi Nauru sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan. Hal ini memberikan kontribusi pada kas pemerintah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Nauru. Pusat penahanan Australia adalah bagian penting dari ekonomi Nauru (Maclellan, 2013).

Australia dan Nauru sering berbicara tentang perjanjian mereka dalam konteks kemitraan, dengan menekankan pada saling membantu dan berkolaborasi. Namun, jelas terlihat bahwa Australia memiliki dominasi yang lebih besar dalam negosiasi (Susanto, 2024). Nauru, sebagai negara yang memiliki masalah ekonomi yang terus-menerus dan tidak memiliki koneksi global, tidak dapat menolak dana yang menyertai penyelenggaraan pusat-pusat penahanan. Kesepakatan ini membantu Nauru menerima jutaan dolar dalam bentuk bantuan dan investasi di bidang konstruksi, yang secara signifikan sangat penting untuk menjaga layanan penting negara tetap beroperasi (Maclellan, 2013). Nauru berkomitmen untuk membantu Australia dengan menampung dan memproses para pencari suaka. Hal ini membawa Nauru masuk ke dalam program perlindungan perbatasan Australia.

Secara politis, para pemimpin Nauru terus menjelaskan mengapa mereka berpartisipasi dalam *Pacific Solution* dengan menyoroti kedaulatan negara dan kerja sama dengan Australia. Para pejabat Nauru mengatakan bahwa perjanjian-perjanjian itu menunjukkan bahwa negara ini dapat menentukan keberpihakan luar negerinya sendiri. Mereka berpendapat bahwa kemitraan dengan Australia telah membuat Nauru tetap berada di panggung utama Pasifik dan membawa keuntungan konkret bagi penduduk negara tersebut. Nauru juga terus mengacu pada peran kemanusiaannya

dalam menampung dan menyediakan layanan pemrosesan pencari suaka, dan menegaskan bahwa keterlibatannya dalam hal ini menjaga keamanan kawasan.

Terlepas dari semua narasi resmi ini, ada arus bawah ketegangan dan kontroversi seputar partisipasi Nauru. Para kritikus mengemukakan bahwa ketergantungan pada dana Australia telah membuat pemerintah Nauru sangat bergantung pada pelestarian rezim pemrosesan lepas pantai, yang mengurangi kemandirian politiknya. Kondisi pusat-pusat penahanan dan dampak dari sistem penahanan terhadap masyarakat Nauru secara keseluruhan juga menjadi perhatian (Maclellan, 2013).

Dari sudut pandang pejabat pemerintahan Nauru, ikut serta dalam *Pacific Solution* bukan hanya soal ide dan pragmatisme, melainkan soal kepentingan nasional dan kelangsungan hidup ekonomi. Nauru terpicil dari lokasi lain, sehingga merupakan lokasi yang cocok untuk kebijakan penahanan lepas pantai Australia. Saking terpicilnya, para pencari suaka terisolasi dari Australia, sehingga mengurangi masalah politik dan sosial yang akan terjadi jika mereka ditahan di daratan (Salyer, 2020). Sementara itu, keterpicilan Nauru dan kurangnya pengaruh global berarti bahwa perhatian internasional terhadap proses dan kondisi di pusat-pusat penahanan sering kali lemah atau lambat mendapatkan daya tarik. Bagi Australia, Nauru merupakan lokasi yang jauh dari segi jarak dan politik dari para pemilih domestiknya. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menerapkan peraturan pengawasan perbatasan yang ketat tanpa menghadapi protes keras dari masyarakat yang dapat terjadi pada penahanan di daratan (Maclellan, 2013).

Singkatnya, peran Nauru sebagai tempat pemrosesan pencari suaka sangat terkait dengan kebutuhan ekonomi negara dan hubungan strategisnya dengan Australia. Keputusan untuk menjadi tuan rumah bagi pusat-pusat penahanan bukan hanya masalah keberpihakan politik; ini juga merupakan cerminan dari terbatasnya pilihan yang tersedia bagi negara kepulauan kecil yang menavigasi dinamika kekuatan global. Meskipun pengaturan ini disajikan sebagai upaya kerja sama, namun pada akhirnya dibentuk oleh ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan, dengan Australia menetapkan persyaratan dan Nauru beradaptasi karena kebutuhan.

#### **4.3. Konstruksi Media atas Citra Pencari Suaka**

Dalam proses sekuritisasi, media memainkan peran ganda, yaitu sebagai penguat sekaligus audiens wacana keamanan. Menurut Wæver, sekuritisasi tidak akan berhasil hanya melalui tindak tutur oleh aktor politik, tetapi hanya jika audiens menerima dan menginternalisasi konstruksi ancaman tersebut (Taureck, 2016). Dalam kasus Australia, media arus utama telah bertindak sebagai audiens yang menerima dan memperkuat dengan mereproduksi narasi pemerintah yang membingkai pencari suaka sebagai ancaman eksistensial. Media-media tersebut melegitimasi kebijakan luar biasa penahanan di luar negeri dengan menyematkan bahasa krisis-istilah-istilah seperti “pendatang maritim ilegal”, “ancaman perbatasan”, dan “risiko keamanan nasional” -ke dalam pemberitaan sehari-hari (Mckay, 2012; Every, 2007). Keselarasan antara bahasa media dan retorika politik ini memfasilitasi transformasi pencari suaka dari individu yang rentan menjadi orang lain yang berbahaya yang menjustifikasi tanggapan negara yang luar biasa.

Selain penggunaan bahasa, media juga menggunakan pementakan visual dan liputan yang selektif untuk mendukung narasi yang diamankan. Laporan berita sering kali menampilkan

perahu yang penuh sesak dan pemandangan laut yang dramatis, yang menekankan pada jumlah dan jarak kedatangan daripada individu di baliknya. Penggambaran yang tidak manusiawi ini mereduksi para pencari suaka menjadi massa yang tidak berwajah, menumbuhkan kecemasan publik dan menjauhkan pemirsa dari realitas kemanusiaan (Mckay, 2012). Selain itu, berita utama sering kali menggunakan perumpamaan krisis seperti “Flood”, “Waves”, atau “Surge” yang menimbulkan rasa kehilangan kendali dan urgensi, sehingga memperkuat perlunya tindakan pembatasan seperti penahanan di lepas pantai (Every, 2007). Representasi semacam itu tidak netral; mereka berkontribusi dalam membentuk persepsi publik dengan cara-cara yang selaras dengan dan menopang logika sekuritisasi.

Mekanisme utama yang digunakan media untuk berkontribusi pada sekuritisasi pencari suaka adalah pemingkakan leksikal. Liputan berita secara rutin menggunakan metafora dan terminologi yang terkait dengan krisis dan ancaman. (Mckay, 2012; Every, 2007). Kata perumpamaan yang dipakai oleh berita untuk menimbulkan rasa takut dan urgensi di kalangan masyarakat. Selain itu, istilah-istilah seperti “Queue-jumpers” atau “Illegal Arrivals” membawa penilaian normatif yang menyiratkan kesalahan, kriminalitas, atau ketidakadilan. Pemingkakan semacam ini mengalihkan fokus dari pertimbangan hukum atau kemanusiaan dan menuju kepanikan moral atas keamanan perbatasan dan kedaulatan nasional. Dengan menanamkan metafora ini secara konsisten ke dalam berita utama, komentar, dan *soundbite* politik, media secara aktif membentuk wacana publik untuk mendukung respons kebijakan luar biasa - termasuk penahanan di luar negeri - sebagai tindakan yang dibenarkan oleh negara untuk membela diri.

Visual juga memainkan peran penting dalam memperkuat efek dehumanisasi dari narasi-narasi yang disekuritisasi. Laporan media sering kali menampilkan foto-foto dari jarak jauh dari perahu-perahu yang penuh sesak di laut, yang menggambarkan para pencari suaka sebagai sosok-sosok yang tidak jelas dan tanpa nama di tengah lautan yang luas dan penuh ancaman. Jarang sekali siaran utama atau karya foto jurnalistik yang menampilkan potret individu atau kesaksian pribadi dari mereka yang ditahan di lepas pantai (Farrell, 2016). Penghapusan identitas ini memungkinkan penonton untuk menafsirkan para pencari suaka sebagai massa yang homogen dan anonim, bukan sebagai individu yang beragam dengan klaim yang sah untuk mendapatkan perlindungan. Ketiadaan nama, wajah, dan cerita berkontribusi pada jarak emosional publik dan melemahkan empati, sehingga memuluskan jalan bagi toleransi publik terhadap kebijakan yang keras. Sifat selektif dari pemingkakan visual ini-berfokus pada jumlah dan kapal daripada orang-melengkapi strategi diskursif untuk menampilkan migrasi sebagai ancaman yang harus dikelola, bukan sebagai krisis kemanusiaan yang harus diselesaikan.

Sementara media secara dominan memperkuat pemingkakan sekuritisasi pemerintah, jurnalis independen dan organisasi kemanusiaan berusaha membangun narasi alternatif yang memanusiakan kembali para pencari suaka. Para aktor ini menantang wacana dominan dengan menyoroti pengalaman hidup para individu di dalam detensi-membagikan kesaksian tentang trauma, perpisahan dengan keluarga, dan gangguan psikologis (Farrel, 2016; Human Rights Watch, 2016). Namun, upaya mereka sering kali terpinggirkan dalam lanskap media yang lebih luas, muncul dalam bentuk opini, program khusus, atau media internasional yang jangkauannya terbatas. Kurangnya akses media ke fasilitas penahanan di luar negeri, ditambah dengan kontrol pemerintah yang ketat terhadap arus informasi, semakin membatasi visibilitas kontra-narasi ini (Every, 2007). Akibatnya, publik lebih sering terpapar pada gambar dan bahasa yang disekuritisasi, yang lama

kelamaan menormalkan persepsi bahwa penahanan di luar negeri adalah hal yang perlu dan dapat diterima sebagai alat kebijakan. Asimetri kekuatan narasi ini menggarisbawahi bagaimana media tidak hanya merefleksikan sentimen publik, tetapi juga secara aktif membentuknya-memainkan peran penting dalam daya tahan tata kelola migrasi yang tersekuritisasi.

Seiring berjalannya waktu, sirkulasi berulang dari bahasa dan citra yang sarat dengan krisis berkontribusi pada normalisasi tindakan luar biasa dalam imajinasi publik. Apa yang dimulai sebagai tanggap darurat sementara menjadi terlembagakan, karena narasi yang disekuritisasi diserap ke dalam wacana sehari-hari. Hal ini mencerminkan pernyataan Wæver bahwa sekuritisasi memungkinkan negara untuk melewati prosedur politik normal dengan kedok urgensi. Dalam kasus Australia, penggambaran yang konsisten oleh media tentang pencari suaka sebagai orang luar yang berbahaya tidak hanya membenarkan, tetapi juga menaturalisasi penahanan di lepas pantai sebagai elemen standar dalam tata kelola perbatasan (Taureck, 2006). Ketika kontra-narasi kemanusiaan berjuang untuk mendapatkan daya tarik, logika media yang dominan terus memprioritaskan keamanan nasional di atas hak asasi manusia, yang memperkuat ketidakpekaan publik terhadap penderitaan pencari suaka. Dengan demikian, media bukanlah pengamat pasif, melainkan partisipan aktif dalam menjaga kondisi politik di mana kebijakan sekuritisasi berkembang.

#### 4.3. Tanggapan dan Respon Kelompok Kemanusiaan

Pemerintah Australia dan sebagian besar media berusaha menampilkan pencari suaka sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Namun, organisasi-organisasi kemanusiaan di seluruh Australia dan di luar negeri berpendapat sebaliknya. Mereka tidak hanya mengutuk kebijakan tersebut, namun juga mencoba membalikkan seluruh perdebatan. Mereka mengungkapkan tragedi kemanusiaan yang terjadi dan mempertanyakan apakah penahanan di lepas pantai itu perlu dilakukan.

Lembaga-lembaga internasional seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, dan UNHCR secara konsisten menyuarakan kritik tajam terhadap praktik penahanan luar negeri, melalui publikasi laporan, narasi, dan investigasi mendalam yang menyajikan representasi alternatif yang kontras dengan citra yang dibangun oleh pemerintah dan sebagian besar media arus utama. Alih-alih mbingkai pencari suaka sebagai ancaman yang tidak teridentifikasi, organisasi-organisasi ini menekankan pengalaman lived mereka dalam menghadapi penganiayaan, pemindahan paksa, dan perjuangan untuk bertahan hidup (Human Rights Watch, 2016).

Organisasi-organisasi kemanusiaan menggunakan strategi penting yang menunjukkan kisah-kisah pribadi para korban kebijakan kepada publik. Kampanye kemanusiaan menceritakan kisah-kisah mengharukan tentang keluarga-keluarga pengungsi yang terpecah belah karena kekerasan, serta anak-anak kecil yang tumbuh dewasa di dalam pagar penjara bersama dengan orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental selama penahanan yang berkepanjangan (Farrel, 2016). Para pendukung hak asasi manusia meminta warga Australia untuk melihat para pencari suaka sebagai orang-orang yang memiliki hak-hak dasar yang sama dengan warga negara manapun, bersama dengan harapan dan ketakutan yang mendasar. Kaum dewasa muda menunjukkan keberhasilan yang kuat dengan pendekatan ini karena mereka berpartisipasi secara masif dalam kegiatan sosial berbasis internet (Hodge, 2019).

Tantangan langsung yang menargetkan dasar hukum dan moral dari penahanan lepas pantai muncul dari organisasi-organisasi kemanusiaan. Human Rights Watch menerbitkan laporan terperinci yang menunjukkan perlakuan buruk dan kelalaian medis serta gangguan mental yang dialami oleh para tahanan di kamp-kamp penahanan Nauru (Human Rights Watch, 2016).

Pelanggaran hak asasi manusia atas kebijakan Australia ditunjukkan dengan menggunakan spesifikasi hukum internasional dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Konvensi Menentang Penyiksaan. Organisasi-organisasi kemanusiaan menambah argumen mereka dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan etika serta standar tanggung jawab internasional sebagai tambahan dari kerangka bahasa moral dan emosional (Refugee Council of Australia, 2023; Moretti, 2021).

Dasar ekonomi dari pusat-pusat penahanan di luar negeri menjadi strategi utama untuk mengungkapkan sifat esensialnya. Kelompok-kelompok tersebut menjelaskan bahwa mengoperasikan fasilitas penahanan lepas pantai membebani pembayar pajak dengan biaya yang lebih tinggi daripada biaya gabungan untuk memproses dan menyelesaikan pencari suaka di Australia. Melalui kolaborasi mereka, Komisi Hak Asasi Manusia Australia bersama dengan Dokter untuk Pengungsi memberikan keahlian yang sangat penting untuk meningkatkan eksposur terhadap keprihatinan kemanusiaan. Koalisi antara berbagai kelompok menciptakan hambatan bagi pemerintah untuk menganggap para pengkritik kemanusiaan sebagai aktivis atau orang luar (Doctors without Borders, 2018).

Ketika membahas tentang Nauru, organisasi-organisasi kemanusiaan melaporkan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Alih-alih menggambarkan Nauru hanya sebagai lokasi lepas pantai yang nyaman, organisasi-organisasi kemanusiaan menarik perhatian pada masalah-masalah parah yang tercipta karena kamp-kamp penahanan di negara kepulauan kecil tersebut. Laporan-laporan media menunjukkan bahwa layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial Nauru yang sangat terbatas tidak mampu memenuhi kebutuhan rezim penahanan (Salyer, 2020).

Selain itu, ketergantungan finansial yang diciptakan oleh pengaturan pendanaan Australia tidak dilihat sebagai transaksi sederhana, tetapi sebagai bentuk kontrol neokolonial-di mana negara yang kuat melimpahkan tanggung jawab hak asasi manusianya kepada negara tetangga yang jauh lebih lemah (Maclellan, 2013).

Organisasi kemanusiaan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menghasilkan minat dunia terhadap situasi Nauru. Perusahaan penyiaran multinasional bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini untuk membagikan cerita dari berbagai perspektif sehingga suara pencari suaka dan orang-orang Nauru dapat diakses oleh audiens di seluruh dunia. Inisiatif ini bertujuan untuk mengubah penahanan di luar negeri menjadi isu internasional untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hal itu merupakan aib duniawi daripada strategi pengelolaan perbatasan yang efektif. Kelompok kemanusiaan menghadapi berbagai rintangan berat selama kegiatan mereka (Moretti, 2022).

Pengumpulan bukti menjadi sangat sulit karena pemerintah memberlakukan banyak pembatasan pada organisasi media yang ingin mengakses fasilitas penahanan. Staf mantan penahanan bersama dengan profesional medis berfungsi sebagai sumber informasi yang penting tetapi pengungkapan mereka sering kali mengakibatkan sanksi profesional dan sanksi hukum. Kesaksian langsung berkembang menjadi komponen penting untuk menciptakan narasi yang berlawanan karena mereka menawarkan pandangan awal ke dalam kerahasiaan resmi yang dijaga.

Dengan demikian, bagaimana kebijakan penahanan luar negeri Australia telah disekuritisasi melalui wacana politik dan media pada tahun 2024? Temuan menunjukkan bahwa aktor politik menggunakan tindakan pidato sekuritisasi menandakan pencari suaka sebagai kedatangan maritim ilegal dan mengaitkan mereka dengan kejahatan atau terorisme untuk membangun narasi ancaman eksistensial (Susanto, 2024). Melalui pengulangan dalam pengumuman kebijakan dan pengarahan media, pernyataan-pernyataan ini mengubah isu kemanusiaan menjadi masalah keamanan nasional. Media arus utama bertindak sebagai audiens yang memfasilitasi, memperkuat kerangka keamanan dengan menggunakan bahasa yang berorientasi pada krisis dan citra yang mendekhumanisasi (Mckay, 2012). Ketika publik menyerap kerangka ini, penahanan di luar negeri dilegitimasi sebagai langkah luar biasa yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan hukum, melewati kewajiban kemanusiaan yang biasa (Every, 2007).

Proses sekuritisasi ini menjelaskan mengapa kebijakan yang banyak dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia tetap bertahan dengan minimal reaksi publik. Ini mengungkapkan bagaimana kontrol atas wacana daripada ancaman objektif memungkinkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan luar biasa. Sementara aktor kemanusiaan menawarkan narasi tandingan, akses media mereka yang terbatas dan visibilitas yang marginal melemahkan dampak strategis mereka. Pada akhirnya, studi ini menyoroti bahwa sekuritisasi beroperasi tidak hanya sebagai alat retorik, tetapi juga sebagai mekanisme praktis untuk ketahanan kebijakan dan kontrol politik.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji bagaimana kebijakan penahanan lepas pantai Australia dalam kerangka *Pacific Solution* 2024 diaktifkan kembali melalui proses sekuritisasi, di mana migrasi tidak teratur dikonstruksi sebagai ancaman keamanan untuk membenarkan tindakan negara yang luar biasa. Dengan menerapkan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Wæver dan Buzan, penelitian ini mengkaji bagaimana pencari suaka dikonstruksi secara diskursif sebagai ancaman eksistensial dan bagaimana pembingkaiannya ini memungkinkan praktik-praktik negara yang luar biasa seperti penahanan di luar negeri. Alih-alih menanggapi krisis yang obyektif, pemerintah Australia secara strategis menggunakan bahasa dan narasi untuk mengangkat migrasi tidak teratur ke dalam ranah keamanan nasional, sehingga melegitimasi langkah-langkah kebijakan luar biasa yang mengabaikan standar hukum dan kemanusiaan yang normatif.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa sekuritisasi tidak hanya dilakukan melalui wacana politik resmi, tetapi juga secara aktif didukung oleh media dan diperkuat oleh hubungan geopolitik Australia dengan Nauru. Aktor-aktor pemerintah menggunakan tindak tutur performatif untuk membingkai para pencari suaka sebagai pendatang maritim ilegal atau ancaman keamanan potensial, dan pembingkaiannya ini diterima dan diperkuat oleh media arus utama. Melalui pembingkaiannya linguistik dan visual, institusi media bertindak sebagai *audiens* penting dalam proses sekuritisasi, menormalkan penggambaran pencari suaka sebagai risiko yang tidak berwajah dan bukannya sebagai individu yang memiliki hak. Sementara itu, instrumentalisasi politik di Nauru menyoroti bagaimana ketergantungan diplomatik dan ekonomi dimasukkan ke dalam arsitektur kontrol migrasi yang disekuritisasi.

Perlu dicatatkan, organisasi-organisasi kemanusiaan dan media independen berusaha untuk melawan narasi sekuritisasi ini dengan menegaskan kembali martabat dan hak-hak hukum para pencari suaka. Namun, visibilitas dan akses mereka yang terbatas membatasi kapasitas mereka untuk membentuk kembali wacana yang dominan. Asimetri ini memperkuat pendapat Wæver bahwa sekuritisasi bukan hanya tentang menyatakan ancaman, tetapi tentang mendapatkan kontrol diskursif tentang bagaimana ancaman tersebut dipahami oleh publik dan ditindaklanjuti secara institusional.

Pada akhirnya, penelitian ini menggarisbawahi bahwa bahasa dan wacana bukanlah cerminan netral dari kebijakan migrasi-mereka adalah instrumen aktif dari pembenaran dan daya tahannya. *Pacific Solution*, sebagaimana yang dipertahankan pada tahun 2024, mencerminkan bagaimana masyarakat demokratis dapat melembagakan pengecualian ketika ketakutan publik dikelola dengan hati-hati melalui retorika keamanan. Memahami proses ini melalui teori sekuritisasi mengungkapkan tidak hanya bagaimana kebijakan semacam itu dibangun dan dipertahankan, tetapi juga batas-batas perlawanan kemanusiaan dalam membentuk kembali narasi dominan.

## REFERENSI

### Jurnal:

- Abbondanza, G. (2024). Out of sight, out of mind? The bipartisan Australian foreign policy on irregular migration. *Australian Journal of International Affairs*, 78(5), 702-721.
- Aulden Warbrooke. (2014). Australia's 'Pacific Solution': Issues for the Pacific Islands. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 1(2), 337-348. <https://doi.org/10.1002/app5.32>
- Alunaza, H., Maulana, I., & Sudagung, A. D. (2018). The Pacific Solution as Australia Policy towards Asylum Seeker and Irregular Maritime Arrivals (IMAs) in John Howard Era. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*; Vol. 14 No. 1 61-75; 2406-8748; 2614-2562. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/2789>
- Every, D., & Augoustinos, M. (2007). Constructions of racism in the Australian parliamentary debates on asylum seekers. *Discourse & Society*, 18(4), 411-436. <https://doi.org/10.1177/0957926507077427>
- Hodge, P. (2019). # LetThemStay# BringThemHere: Embodied politics, asylum seeking, and performativities of protest opposing Australia's Operation Sovereign Borders. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(3), 386-406.
- Maclellan, N. (2013). What has Australia done to Nauru?: politics, privatisation and policing under the 'Pacific solution'. *Overland*, (212), 4-11.
- Mckay, F. H., Thomas, S. L., & Kneebone, S. (2012). "it would be okay if they came through the proper channels": Community perceptions and attitudes toward asylum seekers in Australia. *Journal of Refugee Studies*, 25(1), 113-133. <https://doi.org/10.1093/jrs/fer010>
- Moretti, S. (2021). Between refugee protection and migration management: The quest for coordination between UNHCR and IOM in the Asia-Pacific region. *Third World Quarterly*, 42(1), 34-51.
- Moretti, S. (2022). Contested regionalism in the Asia-Pacific: the case of the Bali Process and the protection of refugees. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48(12), 2855-2872.

- Susanto, C. A. (2024). Kebijakan Migrasi Australia Dalam Hal Pengalihan Pengungsi dan Pencari Suaka ke Nauru dan Papua Nugini. *Jurnal Hubungan Internasional*; Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL; 387-405; 2715-1565; 1411-9382. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/56191>
- Salyer, J. C., Dalsgaard, S., & West, P. (2020). "It Is Not Because They Are Bad People": Australia's Refugee Resettlement in Papua New Guinea and Nauru. *The Contemporary Pacific*, Vol. 32 No. 2. 435-448 . <https://doi.org/10.1353/Cp.2020.0036>.
- Taureck, R. (2006). Securitization theory and securitization studies. *Journal of International Relations and Development*, 9(1), 53–61.
- Tanzila, E. (Elya), & Tjarsono, I. (Idjang). (2015). Motivasi Australia Menerapkan Kebijakan Sekuritisasi Terhadap Irregular Maritime Arrivals (Ima) Tahun 2001-2008. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*. <https://www.neliti.com/publications/32208/motivasi-australia-menerapkan-kebijakan-sekuritisasi-terhadap-irregular-maritim>
- Prasad, N. (2021). Lessons from Australia's Pacific Solution. *Forced Migration Review*, (68).

**Situs Web:**

- Al Jazeera. (6 Maret 2019) Australia to send asylum seekers to remote island for treatment. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2019/3/6/australia-to-send-asylum-seekers-to-remote-island-for-treatment>
- Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières). (11 Oktober 2018). Australian government should end offshore detention on Nauru. Médecins Sans Frontières. <https://www.msf.org/australian-government-should-end-offshore-detention-nauru>
- Farrell, P., Evershed, N., Davidson, H., & Wall, J. (10 Agustus 2016). The Nauru files: cache of 2,000 leaked reports reveal scale of abuse of children in Australian offshore detention. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/10/the-nauru-files-2000-leaked-reports-reveal-scale-of-abuse-of-children-in-australian-offshore-detention>
- Human Rights Watch. (2 Agustus 2016). Australia: Appalling abuse, neglect of refugees on Nauru. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2016/08/02/australia-appalling-abuse-neglect-refugees-nauru>
- Refugee Council of Australia. (2023). Operation Sovereign Borders: Offshore detention statistics. Refugee Council of Australia. <https://www.refugeecouncil.org.au/operation-sovereign-borders-offshore-detention-statistics/>

